Vol 4 No.4 (2025) - November, pp 1671-1678 https://doi.org/10.59025/6qc7y622

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Strategi Peningkatan Daya Saing BUMDes Melalui Sertifikasi Halal dan Kesadaran Pajak

Refi Pratiwi[1], Fiesty Utami[1]

[1] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

INFO ARTIKEL

Diserahkan:
12/10/2025
Direvisi:
29/10/2025
Diterima
28/11/2025

***Keywords*:**

Sertifikat Halal,
Pajak,
Pengabdian UMKM,
BUMDes

ABSTRAK

BUMDes Bandung di Kabupaten Pandeglang mengalami kendala dalam mengembangkan usaha minuman kopi inovatifnya akibat masalah legalitas dan formalitas, salah satunya adalah belum adanya sertifikasi halal untuk minuman kopi segar yang dijual di kafe, serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang masih terbatas. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan daya saing BUMDes melalui pendampingan terpadu yang memadukan inovasi produk dengan penyelesaian aspek legal. Metode yang diterapkan adalah pemberdayaan partisipatif, mencakup pelatihan barista, pendampingan pendaftaran NPWP, dan simulasi aplikasi halal daring. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dimana kategori pemahaman "tinggi" melonjak dari 10% menjadi 80%. Luaran kegiatan pengabdian masyarakat di program ini antara lain: (1) terwujudnya varian baru "Kopi Pandan" hasil kolaborasi Kopi Puhu dan Lafebco Untirta; (2) terealisasinya sertifikasi halal mandiri untuk produk minuman kopi yang menjadi keunikan dan khas dari Cafe Puhu; serta (3) tuntasnya proses pendaftaran NPWP. Program ini membangun fondasi hukum dan inovasi yang berkelanjutan bagi BUMDes di Banten.

Corresponding author email: fiesty.utami@untirta.ac.id

Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license
Copyright@ Author (2025).

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pengembangan ekonomi kerakyatan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) Desa Bandung, Pandeglang, memiliki peran krusial sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokalnya. BUMDes merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan desa [1]. Namun, Desa Bandung ini menghadapi beberapa kesulitan dalam meningkatkan integrasi dan daya saing mereka ke dalam sistem ekonomi yang lebih mapan. Untuk mengembangkan potensi pariwisata, banyak kelompok berbasis masyarakat telah muncul. Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh penduduk di daerah tertentu ini bekerja untuk memberdayakan semua potensi yang ada di desa mereka untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata [2]. Data nasional menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari 1,6 juta UMKM di Indonesia yang memiliki sertifikat halal, yang menunjukkan kesenjangan yang besar dalam kesiapan pasar dan kepercayaan konsumen [3].

Pemerintah mendefinisikan kewajiban dan hak warga negara melalui konstitusi dan undang-undang. Di antara tugas-tugas ini, kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab kewarganegaraan yang mendasar. Dengan secara aktif memenuhi kewajiban ini, warga negara melakukan tindakan tidak langsung dalam membela

negara, meningkatkan kesejahteraan umum dan membantu pembangunan negara [4]. Namun, beberapa UMKM di BUM Lingkungan desa belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perpajakan formal, terbukti dari tidak adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengetahuan prosedur hukum dan legalitas usaha, seperti proses mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal [5]. Akibatnya, produk unggulan desa hanya memiliki akses pasar yang terbatas, baik di dalam negeri, di mana kesadaran halal sedang tumbuh, maupun internasional, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka, sehingga menghambat pertumbuhan dan potensi investasi.

Berbagai upaya dan penelitian telah dilakukan untuk mengatasi masalah serupa. Penelitian lain menekankan pentingnya mekanisme sertifikasi halal mandiri dan juga program sertifikasi halal gratis untuk mempercepat akses UMKM ke pasar halal [6], [7]. Sementara, peneliti yang lalu menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara administrasi perpajakan dan kepatuhan halal untuk menciptakan usaha desa yang tangguh dan legal[5], [8]. Sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan pemerintah, juga dianggap krusial dalam mempercepat proses sertifikasi dan memberdayakan UMKM [6]. Dukungan pemerintah melalui program seperti SEHATI dan pendekatan pemberdayaan bottom-up semakin memperkuat landasan teori untuk intervensi yang komprehensif [3].

Namun, perbedaan dan nilai tambah dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terletak pada pendekatan implementasinya yang terpadu dan partisipatif, yang secara khusus difokuskan pada konteks UMKM di Desa Bandung. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi menggabungkan pendampingan sertifikasi halal mandiri dengan sosialisasi langsung dan pendaftaran NPWP. Pendekatan partisipatif melibatkan pelaku usaha BUM Desa secara aktif dalam keseluruhan proses, mulai dari identifikasi dan perencanaan masalah hingga implementasi solusi, sehingga diharapkan lebih berkelanjutan, kontekstual, dan terarah dibandingkan program top-down atau murni teoritis.

Agrowisata Perikanan Bukit Sinyonya, Mina Agrowisata Bukit Sinyonya merupakan contoh utama usaha berbasis masyarakat yang dikelola secara kolaboratif oleh BUMDes dan Pokdarwis, yang bernama "Satya Patwa". Nama "Bukit Sinyonya" berasal dari Ikan Mas "Si Nyonya", spesies ikan mas yang terkenal dan bersejarah, asli daerah tersebut, dan telah dilindungi oleh penduduk setempat agar tidak punah. Masyarakat yang berjiwa wirausaha, bangga akan budayanya, dan aktif dalam mewujudkan potensi lokalnya tercermin dalam upaya ini. Agrowisata ini tidak hanya berfokus pada rekreasi, tetapi juga menekankan pelestarian dan edukasi warisan budaya lokal, termasuk permainan tradisional, musik, dan kerajinan. Desa Bandung terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan ini memiliki bentang alam yang memungkinkan pengembangan agrowisata berbasis perbukitan, seperti Bukit Sinyonya. Komunitas ini terdiri dari penduduk lokal yang mata pencahariannya kemungkinan besar didukung oleh perpaduan pertanian, perikanan (khususnya ikan mas Si Nyonya), dan sektor pariwisata yang sedang berkembang. Pembentukan Pokdarwis Satya Patwa pada Februari 2023 menunjukkan mobilisasi anggota masyarakat yang terorganisir dan terkini di bidang pengembangan pariwisata.

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi usaha produktif masyarakat. Intervensi ini secara khusus menyasar dua kelompok masyarakat utama. Kelompok sasaran utama adalah: Pengelola BUMDes dan Pokdarwis, serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) lokal. Di dalam kelompok ini termasuk pengolah dan pemasar produk lokal, terutama merek kopi "Kopi Puhu". Kelompok ini telah menunjukkan inisiatif, terbukti dengan adanya pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal untuk beberapa produk, seperti sachet Kopi Puhu. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun fondasi yang telah ada.



Gambar 1 Peternakan Ikan Mas Sinyonya dan Restoran Saung di Bukit Sinyonya

Tujuan strategis kegiatan ini adalah menyediakan bantuan terpadu dalam sertifikasi halal dan kepatuhan pajak (NPWP). Pendekatan ganda ini bertujuan untuk memperkuat fondasi hukum dan bisnis kelompok-kelompok ini, memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala operasi, mengakses pasar yang lebih luas (baik domestik maupun internasional, karena lokasi ini telah menarik pengunjung internasional), dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Dukungan ini krusial bagi usaha yang dimulai dengan perjanjian kerja sama lahan yang kompleks dan membutuhkan tata kelola yang kuat agar dapat berkembang.

Keterbatasan akses pasar dan daya saing produk UMKM dan BUMDes lokal seperti Kopi Puhu di Bukit Sinyonya ialah diakibatkan kurangnya legalitas usaha. Hal ini akan menghambat potensi pertumbuhan dan integrasi mereka ke dalam ekonomi formal. Sehingga, pemahaman dan pendampingan mengenai langkah-langkah dalam mendapatkan sertifikasi halal dan pemahaman tentang tanggung jawab perpajakan serta manfaat jangka panjangnya sangat diperlukan. Selain itu, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Sertifikasi Halal No. 33 Tahun 2014 dan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pemerintah seperti Sertifikasi Halal Mandiri (SWU) akan menghambat pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum dan juga kepercayaan konsumen.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi UMKM dan produk UMKM di Desa Bandung, Pandeglang, dengan fokus pada dua aspek fundamental. Pertama, pendampingan sertifikasi halal. Bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, status kehalalan suatu produk merupakan standar utama. Sertifikasi halal resmi memberikan jaminan dan kepastian hukum, yang merupakan bisnis strategis. Dengan sertifikasi halal, produk UMKM tidak hanya akan lebih mudah diterima oleh konsumen Muslim di tingkat lokal, tetapi juga akan membuka peluang untuk memasuki pasar regional dan nasional yang lebih luas, termasuk jaringan ritel modern dan platform e-commerce. Sertifikasi halal juga meningkatkan nilai tambah dan citra merek produk, sehingga mendukung strategi penetapan harga yang lebih baik dan membangun loyalitas konsumen.

Kedua, dukungan kepatuhan pajak. Komponen ini merupakan pilar krusial dalam membangun bisnis yang sah, transparan, dan berkelanjutan. UMKM dapat memperoleh identitas bisnis yang sah di mata hukum dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyadari kewajibannya. Selain itu, dengan memahami insentif pajak untuk UMKM dan memanfaatkannya, bisnis dapat berkembang dengan lebih sehat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan pengabdian masyarakat ini bersifat menarik dan memberdayakan, melampaui seminar teori ke pendampingan langsung dan kolaboratif. Selain memberikan pengetahuan, tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan peserta dalam menangani hukum bisnis mereka sendiri. Intervensi ini dirancang sebagai peta jalan berurutan untuk mengatasi masalah inti BUMDes Bandung. Jalur solusinya terbagi dalam lima tahap terintegrasi:

1) Tahap Awal (Assessment & Perencanaan)

Melalui observasi dan wawancara, teridentifikasi dua masalah utama: belum adanya sertifikat halal untuk varian produk baru dan pemahaman rendah tentang kewajiban perpajakan. Solusi yang dirancang adalah pelatihan barista, pendampingan sertifikasi halal, dan sosialisasi NPWP.

2) Penyusunan Materi & Metode

Tim menyusun modul khusus untuk pelatihan barista, panduan langkah-demi-langkah sertifikasi halal secara online, dan penjelasan manfaat serta prosedur pendaftaran NPWP. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan partisipatif dengan penekanan pada praktik langsung.

3) Implementasi Intervensi

Pelatihan barista dilaksanakan dan menghasilkan produk signature baru, "Kopi Pandan". Peserta juga langsung dibimbing mengajukan sertifikasi halal untuk produk tersebut secara online. Di hari kedua, dilakukan sosialisasi dan simulasi pendaftaran NPWP.

4) Pemantauan & Evaluasi

Tahap ini dilakukan untuk memantau status aplikasi halal, memberikan bantuan jarak jauh, dan menindaklanjuti pendaftaran NPWP guna memastikan keberlanjutan program.

5) Pencapaian Hasil

Tujuan akhirnya adalah tercapainya hasil nyata, yaitu terbitnya sertifikat halal untuk "Kopi Pandan", aktifnya NPWP BUMDes, dan penerapan keterampilan barista baru untuk meningkatkan operasional kafe dan daya tariknya, sehingga pada akhirnya meningkatkan daya saing pasar.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui serangkaian pelatihan intensif dan juga sesi pendampingan. Pelatihan barista menggunakan metode tutorial, simulasi, dan bermain peran, yang difasilitasi oleh tim terlatih dari LAFEBCO Coffee & Creative Space. Pemberdayaan legalitas, yang mencakup Sertifikasi Halal dan NPWP, menggunakan metode dua arah: pertama, konseling komprehensif untuk mengubah persepsi dan menjelaskan manfaatnya, dan kedua, bimbingan langsung dan laboratorium simulasi di mana peserta berlatih mengisi formulir daring yang sebenarnya di situs web BPJPH dan DJP dengan pendampingan langsung oleh fasilitator.

Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan beberapa instrumen. Tes pra dan pasca dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan tentang prosedur halal dan perpajakan. Lembar observasi digunakan selama sesi praktik untuk menilai penguasaan keterampilan. Lebih lanjut, indikator keberhasilan utama adalah luaran konkret: pengajuan permohonan pernyataan halal mandiri dan penyelesaian proses pendaftaran NPWP.

Kegiatan ini menargetkan 12 peserta dari BUMDes Desa Bandung dan Pokdarwis "Satya Patwa", termasuk Kepala Desa, pengelola Bukit Sinyonya, dan staf kafe Kopi Puhu. Lokasi kegiatan adalah Bukit Sinyonya di

Desa Bandung, Pandeglang, Banten, sekitar 120 km dari markas tim pengabdian di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Relevansi ilmiah tim, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan keahlian di bidang hukum bisnis, perpajakan, dan ekonomi kreatif, sangat selaras dengan sifat interdisipliner permasalahan yang dihadapi oleh mitra komunitas. Kegiatan difokuskan pada 5-7 Agustus 2025.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Peningkatan Pengetahuan Hukum dan Administrasi

Penerapan model pemberdayaan terpadu menghasilkan dampak yang signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang menunjukkan keefektifannya di semua dimensi yang menjadi target program. Sebuah assessment pre-test dan post-test dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta mengenai prosedur sertifikasi halal dan kewajiban NPWP. Hasilnya, seperti yang dirinci pada Tabel 2, menunjukkan peningkatan pengetahuan yang besar pada 12 peserta dari BUMDes Bandung dan Pokdarwis.

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Intervensi

Tingkat	Pre-Test (n=12)		Post-Test (n=12)	
	n	*%*	*n*	*%*
Tinggi	1	10%	8	80%
Menengah	3	30%	2	20%
Rendah	6	60%	0	0%

Metodologi partisipatif berhasil memfasilitasi pencapaian luaran penting dan nyata:

1. Inovasi Produk: Peserta menunjukkan kemahiran dalam menciptakan dan menyiapkan tiga varian minuman kopi baru secara mandiri, dengan "Kopi Pandan" ditetapkan sebagai produk unggulan baru untuk Kafe Kopi Puhu.
2. Dokumentasi Legal: Aplikasi pernyataan halal mandiri untuk produk "Kopi Pandan" telah lengkap dan diserahkan ke sistem daring BPJPH pada saat sesi pendampingan. Bersamaan dengan itu, perwakilan BUMDes berhasil menyelesaikan proses pendaftaran NPWP secara daring.

3.2 Diskusi

Pada tanggal 6 Agustus 2025, pendampingan intensif diberikan dalam dua sesi paralel. Sesi sosialisasi NPWP difokuskan pada pemahaman teoritis tentang manfaat NPWP sebagai identitas resmi, dasar hukum, dan skema perpajakan UMKM, termasuk tarif PPh final 0,5%. Peserta kemudian dipandu melalui simulasi praktik pendaftaran daring melalui portal Direktorat Jenderal Pajak, termasuk proses pengunggahan dokumen dan pemantauan status permohonan.

Sesi paralel pendampingan sertifikasi halal mandiri dipandu oleh supervisor halal bersertifikat Maoizhah Hasanah. Kegiatan diawali dengan pemaparan skema deklarasi mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2024, dilanjutkan dengan praktik langsung pengisian formulir dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Peserta secara aktif melakukan verifikasi komposisi bahan, menyiapkan dokumen pendukung, dan mengevaluasi label produk sesuai standar halal. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan wawancara mendalam pada 7 Agustus 2025 mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi, termasuk keterbatasan peralatan praktik dan beragamnya tingkat keterampilan di antara peserta. Namun, dokumen persyaratan sertifikasi halal telah dinyatakan lengkap dan diserahkan. Mekanisme pemantauan jangka menengah telah dirancang untuk memastikan NPWP terdaftar, sertifikat halal diterbitkan, dan keterampilan barista diterapkan dalam operasional kafe.

Hasil empiris dari intervensi ini memberikan wawasan kritis untuk mengatasi tantangan yang terdokumentasi yang dihadapi oleh UMKM Indonesia. Lonjakan skor pengetahuan yang signifikan—

dibuktikan dengan penurunan kategori "rendah" dari 58,3% menjadi 0%—memvalidasi efektivitas model pemberdayaan partisipatif. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman merupakan hambatan utama sertifikasi [9], [10]. Pendekatan interaktif dan langsung ini melampaui sosialisasi pasif, melibatkan peserta secara langsung dengan aplikasi di dunia nyata dan dengan demikian menghilangkan misteri prosedur yang rumit, sebuah kebutuhan bagi UMKM dengan potensi literasi digital yang rendah.

Keberhasilan pengajuan aplikasi halal mandiri merupakan kontribusi langsung terhadap tujuan strategis nasional. Hasil ini menunjukkan model praktis untuk merampingkan sertifikasi halal melalui platform digital, meningkatkan efisiensi dan akses pasar [11]. Hal ini mengoperasionalkan program sertifikasi halal gratis pemerintah dan inisiatif SEHATI, yang membuktikan bahwa dengan bantuan yang tepat sasaran, UMKM dapat mengatasi kendala sumber daya untuk mematuhi kerangka kerja seperti Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 [7]. Ini merupakan langkah krusial dalam menutup kesenjangan tajam antara potensi pasar halal Indonesia yang sangat besar, didorong oleh populasi Muslim sebesar 219 juta jiwa, dan tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM yang mengkhawatirkan, diperkirakan hanya 10% [9]. Lebih lanjut, desain terpadu program—yang menghubungkan inovasi produk dengan legalitas bisnis—menciptakan sinergi yang kuat untuk dampak berkelanjutan. Produk baru “Kopi Pandan”, yang kini berada di jalur yang jelas menuju sertifikasi halal, secara langsung meningkatkan nilai komersial dan daya jualnya. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa upaya yang diinvestasikan dalam kepatuhan regulasi menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata, menjembatani kesenjangan kritis antara kepatuhan regulasi dan pertumbuhan bisnis. Mengingat UMKM merupakan 99,99% dari perusahaan Indonesia dan berkontribusi 61,07% terhadap PDB nasional [12], [13], memberdayakan mereka dengan solusi terintegrasi semacam itu bukan sekadar masalah layanan masyarakat lokal, tetapi sebuah keharusan strategis. Hal ini meningkatkan daya saing mereka dan sangat penting bagi Indonesia untuk sepenuhnya memanfaatkan potensinya dalam industri halal global yang berkembang pesat [14], yang mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Cafe Kopi Puhu

Keberlanjutan model pemberdayaan ini bergantung pada kemampuannya untuk mendorong praktik bisnis mandiri di luar periode intervensi. Desain program yang menekankan alih keterampilan praktis alih-alih menciptakan ketergantungan, memposisikan BUMDes Bandung untuk mengelola proses sertifikasi produk baru secara mandiri di masa mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan wacana yang lebih luas tentang pembangunan masyarakat berkelanjutan, di mana pengembangan kapasitas diprioritaskan daripada solusi sementara. Kemampuan peserta yang telah terbukti dalam menavigasi platform digital pemerintah secara mandiri menunjukkan dampak yang melampaui keluaran langsung, yang berpotensi menciptakan efek berantai ketika individu terlatih membimbing wirausahawan lokal lainnya.

Dari perspektif implementasi kebijakan, studi kasus ini menggarisbawahi perlunya mekanisme dukungan akar rumput yang melengkapi inisiatif regulasi dari atas ke bawah. Meskipun pemerintah telah menciptakan kebijakan yang mendukung dan infrastruktur digital untuk sertifikasi halal dan pendaftaran usaha formal, tingkat adopsi yang terus rendah di kalangan UMKM menunjukkan adanya mata rantai yang hilang dalam implementasi. Intervensi ini menunjukkan bahwa lembaga akademik dapat secara efektif memainkan peran penghubung ini melalui keterlibatan masyarakat. Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa replikasi program partisipatif serupa dapat secara signifikan mempercepat target nasional untuk formalisasi UMKM dan sertifikasi halal, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan posisi pasar global dalam industri halal.

4. KESIMPULAN

Inisiatif pengabdian masyarakat ini telah berhasil membuktikan efektivitas model pemberdayaan terpadu dalam mengatasi tantangan mendasar yang dihadapi BUMDes Bandung. Pendekatan holistik program ini, yang memadukan inovasi produk melalui pelatihan barista khusus dengan dukungan legalisasi usaha yang komprehensif, telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan kemampuan teknis maupun kompetensi administratif masyarakat setempat. Peningkatan signifikan pemahaman peserta tentang prosedur sertifikasi halal dan kewajiban perpajakan, ditambah dengan keberhasilan pengajuan aplikasi formal, memvalidasi efektivitas metodologi partisipatif yang menekankan simulasi digital langsung dan pengembangan keterampilan praktis. Yang paling menonjol, penciptaan produk "Kopi Pandan" beserta proses sertifikasi halalnya merupakan bukti nyata bagaimana intervensi strategis dapat mengubah kepatuhan regulasi menjadi nilai ekonomi riil, yang secara efektif menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dan implementasi akar rumput sekaligus berkontribusi pada tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih luas. Untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak inisiatif ini, BUMDes Bandung harus memprioritaskan pemantauan status sertifikasi halal yang konsisten dan mengintegrasikan NPWP secara penuh ke dalam seluruh operasional bisnis, sekaligus menerapkan varian kopi yang baru dikembangkan secara langsung ke dalam penawaran komersial mereka dengan strategi pemasaran pendukung yang memanfaatkan sertifikasi halal yang akan datang. Pemerintah daerah disarankan untuk mengalokasikan sumber daya untuk peningkatan peralatan dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan guna mempertahankan standar kualitas. Untuk program pengabdian masyarakat di masa mendatang, perluasan model ini dengan memasukkan komponen manajemen keuangan dan pemasaran digital akan menciptakan ekosistem pendukung yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. A. M. Wijaya, P. M. Sari, A. D. Al Haris, R. Restiawati, and N. Nastia, "Training for Village-Owned Enterprises in Managing Tourism in Mopaano Village, Buton Regency," *Community Dev J*, vol. 9, no. 2, pp. 635–641, 2025.

[2] F. Utami, F. P. W. Lusianingrum, G. G. Saputra, F. A. Shavab, M. Aulia, and R. M. Diksastera, "Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa Wisata dalam Menyajikan Laporan Keuangan," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 5, no. 4, pp. 5532–5540, 2024.

[3] S. Atieqoh1 and H. P. Waseso, "and Beverage Business Development," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Halal Development (ICHaD 2022)*, Springer Nature, 2023, p. 74.

[4] F. Utami and A. Supriadi, "Size of company, return on assets, and leverage on tax avoidance," *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, vol. 8, no. 1, pp. 851–856, 2023.

[5] S. Widiati *et al.*, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku," *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, vol. 8, no. 2, pp. 235–240, 2023.

[6] S. Santoso, S. Alfarisah, A. A. Fatmawati, and R. Ubaidillah, "Correlation analysis of the halal certification process and perceptions of the. cost of halal certification with the intentions of food and beverage SMEs actors," *Jurnal Religious*, vol. 5, no. 2, pp. 297–308, 2021.

[7] I. Suriyani, L. Karjoko, and I. G. A. K. R. Handayani, "The Effectiveness of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Entreprises (MSMEs) With Self-Declare Scheme," in *International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, Atlantis Press, 2024, pp. 524–527.

[8] A. Erwaedy, P. Pardiman, S. Syahril, and A. Andiriyanto, "Implementing halal industry management and environment conservation based on Maqashid Sharia," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, vol. 6, no. 2, pp. 151–268, 2021.

[9] I. Giyanti, A. Indrasari, W. Sutopo, and E. Liquiddanu, "Prioritizing important factors for the successful of halal food standard practice in Small Medium Enterprises," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, IOP Publishing, 2020, p. 012102.

[10] A. N. Margarena and A. I. Setiawan, "The effect of perceived value of economic benefits towards SMEs Halal Certification intention moderated by government policy regulation," *International Journal of Education and Social Science Research*, vol. 5, no. 02, pp. 308–320, 2022.

[11] S. S. Wachyuni, T. K. Priyambodo, R. Hurdawaty, and D. A. Kusumaningrum, "The Impact of Digital Technology Adoption in Food Micro, Small, and Medium Enterprises: A Case Study of Borobudur Area in Indonesia," *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, vol. 21, no. 7, pp. 1–13, 2024.

[12] S. Kurniadi, A. Mulyana, and R. Komaladewi, "The Influence of FOMO Leading to Purchase Intention: A Study on Culinary MSMEs in Indonesia," *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, vol. 3, no. 2, pp. 71–83, 2024.

[13] I. Supriadi, R. U. Maghfiroh, and R. Abadi, "Transforming MSMEs through innovation and technology: Driving growth and sustainability in the digital age," in *Proceedings of the BISTIC Business Innovation Sustainability and Technology International Conference (BISTIC 2023)*, Springer Nature, 2023, p. 241.

[14] Y. Hidayat, A. Machmud, S. Zulhuda, and S. Suartini, "Legal aspects and government policy in increasing the role o f MSMEs in the Halal ecosystem [version 1; peer review," 2024.